

Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi *E-Planning* Di Kantor Kecamatan Dumai Kota

Yessi Hayati

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Korespondensi : yessihayati25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam penginputan dan memverifikasi usulan prioritas hasil musrenbang tingkat Kecamatan melalui aplikasi e-planning. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan musrenbang dan faktor penghambat dalam mengefektifkan pelaksanaan musrenbang melalui aplikasi *E-Planning* di Kantor Kecamatan Dumai Kota, menggambarkan kenyataan dilapangan oleh sebab itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melalui hasil wawancara, observasi partisipan dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian proses yakni peneliti terlibat langsung dalam proses kegiatan yang menjadi objek penelitian. Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat lima kategori efektivitas dari pelaksanaan Musrenbang melalui aplikasi *E-Planning* ini yaitu Produksi, efisiensi, Kepuasan, keadaptasian, dan perkembangan yang menjelaskan bahwa Musrenbang melalui aplikasi *E-Planning* ini berjalan dengan efektif sehingga *e-Planning* dapat memudahkan proses Perencanaan dan Pembangunan daerah. Faktor penghambat dari Musrenbang melalui Aplikasi *E-Planning* ini adalah Penginputan ulang pengusulan untuk data musrenbang yang tidak di akomodir ditahun sebelumnya (n-1), Jaringan (server) dan waktu yang dibatasi dengan terkuncinya aplikasi, dan Partisipasi yang kurang aktif dari stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Musrenbang tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan.

Kata Kunci : Efektivitas, E Planning, dan Musrenbang

Abstract

This research was motivated by problems in inputting and verifying the priority proposals for the results of the sub-district musrenbang through the e-planning Application. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of musrenbang and the inhibiting factors in implementing musrenbang effectively through the E-Planning Application at the Dumai City District Office, describing the reality on the ground. Therefore, researchers used descriptive qualitative research methods through interviews, participant observation, and documentation. . Qualitative research is process research. Namely, researchers are directly involved in the activities that are the object of research. The results of this study are that there are five categories of effectiveness from the implementation of the Musrenbang through the E-Planning Application, namely Production, efficiency, Satisfaction, adaptability, and development which explains that the Musrenbang through the E-Planning Application runs effectively so that e-Planning can facilitate the Planning process. and regional development. The inhibiting factors of Musrenbang through this E-Planning Application are re-inputting proposals for Musrenbang data that were not accommodated in the previous year (n-1), Network (servers) and time-limited by application locks, and less active participation from stakeholders and organizations Relevant Regional Apparatus (OPD) at the Musrenbang at the Kelurahan and Kecamatan level.

Keywords: *Effectiveness, E Planning, and Musrenbang*

1. PENDAHULUAN

Dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan ditingkat daerah adalah salah satunya tahapan penyusunan rencana yang diawali melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sebuah mekanisme perencanaan untuk mempertemukan langsung usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat atau dikenal dengan bottom up planning dengan apa yang akan diprogramkan oleh pemerintah yang dikenal dengan top down planning.

Sehingga diharapkan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, agar tercapainya pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta tidak berperan atau tidak berfungsi. Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi, termasuk forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Dalam Musrenbang Kelurahan pemerintah Kelurahan dan warga berembuk menyepakati penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan. Peraturan Walikota nomor 44 tahun 2017 adalah untuk :

- a. Mengatur pengelola aplikasi e-planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
- b. Mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengelolaan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan Perubahan RKPD.

Tujuannya untuk :

- a. Memberikan acuan pelaksana dan penggunaan aplikasi e-planning bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
- b. Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik;
- d. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Dari uraian diatas peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam usulan prioritas hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan melalui sistem e-planning dalam program musrenbang di Kantor Camat Dumai Kota dengan indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Banyaknya usulan dari rembuk Rukun Tetangga (RT) yang tidak diprioritaskan
2. Banyaknya usulan kegiatan prioritas yang tidak teralisasi
3. Batas waktu penginputan terbatas untuk menginput banyaknya usulan prioritas yang ditentukan oleh Bappeda Kota Dumai
4. Selalu terjadi kesalahan menunjukkan usulan kegiatan yang ditujukan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang melalui Aplikasi *E-Planning* di Kantor Kecamatan Dumai Kota.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui hasil wawancara, observasi partisipan dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian proses yakni peneliti terlibat langsung dalam proses kegiatan yang menjadi objek penelitian. Menurut Boghdan & Biklen (1975)., penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang yang diamati.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukandi Kantor Kecamatan Dumai Kota Jalan Pattimura No.01 Kota Dumai. Mengingat Kecamatan Dumai Kota berada ditengah kota dan merupakan salah satu pemekaran kecamatan. Berdasarkan pengamatan terdapat gejala dan masalah terhadap efektivitas pelaksanaan Musrenbang melalui aplikasi *e-planning* di Kantor Kecamatan Dumai Kota.

Informan merupakan cara kita untuk memperoleh informasi dan data untuk bahan baku menganalisa penelitian. Supaya peneliti mempunyai data yang valid maka disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Adapun sebagai informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Camat Dumai Kota
2. Kasubbag Perencanaan keuangan dan Aset
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait seperti DLH, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Perkim
4. Bappeda (bagian admin atau operator)
5. Lurah
6. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
7. Ketua Rukun Tetangga (RT)

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi *E-Planning* Di Kantor Kecamatan Dumai Kota.

Menyusun perencanaan pembangunan dan mengikuti percepatan teknologi dengan meningkatkan kemajuan sistem maka penggunaan aplikasi untuk pelaksanaan musrenbang telah diterapkan oleh seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai. bahkan setiap organisasi perangkat daerah di Kota Dumai telah didukung dalam pelaksanaan musrenbang melalui aplikasi *e-planning* ini. kecamatan dan kelurahan yang aktif dalam penginputan pengusulan perencanaan pembangunan yang dilakukan selama setahun sekali pada awal tahun dari bulan maret ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok bidang usulan yaitu bidang infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi. Pelaksanaan musrenbang melalui aplikasi ini merupakan salah satu terobosan terbaru untuk memudahkan pekerjaan serta penyusunan perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara transparan serta tepat waktu. Dengan adanya penggunaan aplikasi *e-planning* untuk perencanaan pembangunan di Kota Dumai ini maka masyarakat juga ikut berperan aktif dalam merasakan manfaatnya secara langsung dan para operator serta admin dari OPD dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Berdasarkan dari fenomena yang dibahas oleh peneliti mengenai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan melalui aplikasi *e-planning* ini maka efektivitasnya akan dibahas dengan menggunakan teori oleh Richard Steers yang mempertimbangkan bahwa terdapat 5 unsur kriteria yang

menjadi pengukuran efektivitas yakni sebagai berikut

1. Produksi

Dalam rangka tumbuhnya usaha yang dilakukan oleh pemerintahan yaitu Organisasi Pemerintahan Daerah pada dinas terkait serta kelurahan dan kecamatan maka aplikasi e-planning dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ini dapat mengurangi biaya pengeluaran yang berlebihan serta dapat menekan biaya operasional. hal lain juga dirasakan yaitu untuk mempercepat waktu pengerjaan penyusunan anggaran pembangunan daerah. Dalam kegiatan produksi akan menghasilkan upaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang melaksanakannya yaitu seperti kemudahan dalam bekerja karena penggunaan aplikasi e-planning dalam kegiatan musrenbang dapat memudahkan pekerjaan sehingga penyusunan anggaran dapat cepat terselesaikan, selanjutnya dalam kegiatan produksi ini juga akan menghasilkan suatu keputusan dan direkomendasi dari kegiatan yang akan dianggarkan satu tahun kedepan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta perencanaan pembangunan.

Pembuatan keputusan dalam kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan di Kecamatan bahwa pembuatan keputusan dalam usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan yaitu adalah Camat yang diiringi dengan pelaksana lainnya dan yang telah diberi tugas. Dalam musrenbang ini akan menghasilkan kesepakatan dari pemangku kepentingan yang ikut serta dalam pembangunan serta rancangan RKPD. Keterlibatan beberapa pihak dalam perumusan kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.

2. Efisiensi

Keberhasilan ini diukur berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan serta pemanfaatan sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang diinginkan tersebut karena efisiensi dipahami bahwa semakin efektif penggunaan biaya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan semakin bagus manajemen sumber daya yang dilakukan sehingga mencapai hasil yang sesuai dengan perencanaan kegiatan maka hal ini akan disebut juga dengan efisien. Penggunaan sumber daya yang sedikit belum tentu merupakan hal yang efisien dalam pelaksanaan program kerjanya hal ini ditentukan dari tujuan dan Kegiatan apa yang dilakukan tersebut karena pasti dalam melakukan perencanaan kegiatan memiliki sebuah target dan tujuan biasanya perencanaan bisa memilih sumber daya tenaga manusia yang banyak dengan waktu pengerjaan yang cepat atau petunjuk pengerjaan yang lama dengan tenaga manusia yang cukup terbatas hal ini disampaikan hasil maksud pelaksana ingin melaksanakan kegiatan tersebut.

Cara untuk mengakomodir usulan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan agar lebih efisien yaitu dengan melakukan survei lokasi kelapangan untuk mengeksekusi dari usulan yang akan dilaksanakan hal ini untuk mengkonfirmasi Apakah dapat dilaksanakan kegiatan atau tidak. Program kegiatan dipertimbangkan sesuai dengan keadaan sosial dan lingkungan yang menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan. Sementara itu penginputan usulan dari musyawarah perencanaan tentang pembangunan bisa juga dapat lebih efisien dan efektif dengan begitu banyak pula usulan usulan yang diajukan.

3. Kepuasan

Kepuasan juga memiliki manfaat yang dirasakan kepada para pengguna hal ini merupakan suatu sarana untuk menghadapi konflik sisi yang berada di masa akan datang. membangun jiwa kompetitor sehingga berpacu pacu untuk melakukan promosi yang terbaik pada organisasi serta sarana prasarana yang lebih lengkap dan memiliki aset yang jelas, hal lain yang menjadi manfaat juga pelaksana berusaha menjamin kepuasan dari pengguna agar pekerjaan yang dilakukannya tetap bertumbuh dan berkembang sehingga para pelanggan akan mau kembali lagi dan memberikan referensi yang tepat dan diharapkan mendapatkan referensi yang baik. Agar tenaga penginput data haruslah memiliki keahlian

khusus dan juga setelah melalui sosialisasi dan pelatihan oleh Bappeda Kota Dumai agar proses input mengenai usulan dari perencanaan pembangunan daerah tidak terhambat karena jika tenaga ahli dari orang yang tidak memiliki keahlian maka akan memperlambat proses penginputan data.

4. Keadaptasian

keadaptasian timbul apabila sebuah organisasi dapat benar-benar menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dengan kondisi sosial dimana dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan dan pembangunan ini penggunaan aplikasi eplanning merupakan salah satu cara penyesuaian terhadap lingkungan sosial lingkungan kerja dimana kebutuhan akan kemudahan akses serta kemudahan dalam mencapai sasaran dan membuat penyelenggaraan aplikasi e-planning ini terus melakukan perkembangan. Adaptasi yang dirasakan yaitu di antara pengguna yakni stakeholder dan operator yang menjadi orang-orang yang berhubungan langsung dengan aplikasi e-planning ini. Terdapat hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan ini bahwa terdapat usulan-usulan yang masuk disampaikan itu berupa masalah atau kegiatan di Kelurahan hal ini sering terjadi dalam skala prioritas.

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan ini diharapkan juga bisa menjadi sarana untuk menampung wadah aspirasi dari masyarakat sehingga bisa disampaikan dan diadvokasi kan untuk dapat di implementasikan ke dalam program di pemerintahan. penataan program-program yang baik diharapkan oleh masyarakat ini dapat dirasakan masyarakat itu sendiri untuk kesejahteraannya.

Terdapat adaptasi dari data musrenbang yang digunakan dalam aplikasi, adaptasi secara teknis ini sangat diperlukan dan diperhatikan sebagai salah satu kunci kesuksesan dari penyelenggaraan musyawarah perencanaan dan pembangunan melalui aplikasi e-planning. di mana dalam hal ini aparatur di Bappeda yang telah bertugas dan diberikan tugas untuk memverifikasi data usulan dari Kecamatan ke dalam aplikasi hanyalah bertugas untuk memperhatikan atau memantau usulan-usulan dari kecamatan namun tidak ikut serta dalam melakukan penginputan, tetapi Bappeda memantau apakah benar sudah sesuai usulan dimasukan atau diteruskan ke OPD terkait.

5. Perkembangan

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah bisa berjalan dan bisa mendukung terus pembangunan di Kota Dumai secara berkelanjutan. Untuk itu Organisasi Perangkat Daerah atau Kecamatan harus bisa berkembang dengan baik dalam memajukan organisasinya. Dalam hal ini, Bappeda sebagai Organisasi yang diberikan tanggungjawab mengenai penyusunan perencanaan dalam pembangunan daerah. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan musrenbang oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai melalui aplikasi e-planning yang dijadikan sebagai alat bantu yang berbasis elektronik untuk kemudahan proses dalam pekerjaan penginputan dan memverifikasi data usulan dari musrenbang yang diusulkan dari kesepakatan masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah dalam merencanakan pengembangan daerah berintegrasi antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran yang ada, musyawarah perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan aplikasi e planning diketahui merupakan bentuk terobosan baru dari aplikasi simda yang dalam hal ini berfungsi untuk mengusulkan program skala prioritas serta membantu memberikan kemudahan dalam menentukan program yang tepat dalam pembangunan daerah kepada masing-masing dari operator pada OPD dan Kecamatan.

Pelaksanaan aplikasi e-planning terus mengalami perkembangan serta melalui proses kelangsungan hidup dengan perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkembangan yang ditunjukkan dari hasil implementasi e planning dalam bentuk pertanggung jawabannya dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Walaupun kegiatan berlangsung menggunakan sistem online yaitu penginputan usulan-usulan ke dalam aplikasi e-planning namun juga terdapat perhatian khusus yang diberikan kepada personil dan operator yang melakukan data input baik dari segi waktu dan sarana yang digunakan. sarana dan prasarana yang dipersiapkan untuk memperlancar kegiatan penginputan data seperti perangkat keras komputer keyboard dan ruangan kerja yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dan hal ini juga menentukan dari keberhasilan pengusulan agar bisa konsentrasi dengan baik. Pembangunan daerah dapat dilakukan dengan diadakan kegiatan musrenbang dalam hal ini masyarakat dapat membuat usulan apa yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Mewujudkan reformasi birokrasi yang teratur dan transparansi merupakan hal yang penting yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan dalam meraih informasi. Namun sebenarnya bentuk transparansi sangat beresiko sehingga haruslah memiliki strategi dalam membuat transparansi anggaran karena masalah yang ditimbulkan akan muncul dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dan pihak-pihak yang merugikan.

3.2 Faktor-faktor penghambat dalam mengefektifkan pelaksanaan musrenbang melalui aplikasi e-planning di Kantor Kecamatan Dumai Kota.

Penyelenggaraan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kota Dumai khusus di kecamatan Dumai kota masih memiliki beberapa kekurangan yang harus diselesaikan dan hambatan ini juga diketahui dampak langsung kepada pelaksanaan proses aplikasi e-planning untuk program pembangunan daerah di Kota Dumai Adapun hambatan-hambatan tersebut dijelaskan oleh Bapak Budi Hasnul selaku Sekretaris dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai sekaligus penanggungjawab dari aplikasi e-planning Kota Dumai sebagai berikut:

1. Penginputan ulang pengusulan musrenbang untuk data usulan yang tidak di akomodir ditahun sebelumnya (n-1)

hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan aplikasi e-planning ini yakni setiap tahun terjadi penginputan data yang berulang-ulang hal ini merupakan usulan yang diinput tahun lalu dan tidak diakomodir dan bagi pengusul jika ingin merekomendasikan ulang maka harus mengusulkan kembali usulan kegiatan yang baru untuk perencanaan di tahun depan sehingga data tersebut memang tidak muncul di tahun berikutnya maka perlu input kembali

2. Jaringan server dengan jadwal yang dibatasi

Hambatan selanjutnya yaitu karena jaringan server yang sulit diakses dan jadwal pengaksesan yang masih dibatasi. hal ini juga sebenarnya untuk alasan keamanan dari jalur akses menuju ke aplikasi e-planning karena dalam hal ini aplikasi planning memiliki database yang sangat banyak dan cukup global karena diperhatikan agar meminimalisir hacker untuk merubah dari sistem pelaksanaan aplikasi e-planning ini karena angka yang berubah dalam satu bidang akan mempengaruhi bidang lainnya sehingga terjadi ketidak sinkronisasi dan ketidak integrasi antar program dari satu organisasi ke organisasi lainnya.

3. Partisipasi yang kurang aktif dari stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Musrenbang ditingkat Kecamatan

Kegiatan Musrenbang harus dilaksanakan setiap tahunnya akan tetapi pada pelaksanaan musrenbang dari tingkat kelurahan sampai tingkat Kecamatan dilihat kurangnya partisipasi masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut sama halnya dengan kehadiran OPD terkait.

Bahkan kesulitan dalam mengadakan pertemuan untuk stakeholder dan OPD terkait dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kelurahan dan kecamatan ini menjadi kendala sehingga harus adanya kebijakan pemerintah yang tegas agar para stakeholder yang berada dalam tatanan kelurahan dan kecamatan mau ikut bergabung dan berkontribusi memberikan masukan dan program demi pembangunan dan pengembangan daerah Kota Dumai.

Dari awal kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan terdapat kendala-

kendala yang dirasakan oleh masyarakat ketika kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan berlangsung Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat serta undangan yang harusnya hadir sebagai peserta dalam kegiatan musyawarah perencanaan pengembangan di tingkat Kelurahan atau kecamatan ini sangat minim ini juga menyebabkan hasil dari musyawarah perencanaan kurang tajam karena peserta yang diikuti tidak memenuhi harapan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang melalui Aplikasi E-Planning di Kantor Camat Dumai Kota, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dinilai kegiatan Musrenbang melalui E-Planning dengan kriteria dari produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan perkembangan telah efektif.

Hambatan-hambatan dalam mengefektifkan Pelaksanaan Musrenbang melalui aplikasi e-planning di Kantor Kecamatan Dumai Kota ditemukan adalah penginputan ulang pengusulan untuk data musrenbang yang tidak diakomodir ditahun sebelumnya (n-1), jaringan (server) dan waktu yang dibatasi dengan terkuncinya aplikasi, partisipasi yang kurang aktif dari stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Musrenbang tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan.

5. SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh penulis melalui penelitian ini yaitu :

1. Sistem aplikasi E-Planning diharapkan terus berkembang dan diperbaiki lagi pada penginputan data usulan musrenbang agar tidak terjadi penginputan yang berulang-ulang sehingga penggunaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dapat lebih efektif
2. Agar Dinas terkait mempunyai tanggungjawab atas tugas dan fungsinya dalam mensosialisasikan program-program kegiatan pada saat kegiatan Musrenbang dan Dinas Kominfo memberikan penambahan jaringan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat OPD melakukan penginputan dan memverifikasi data Musrenbang
3. Pemerintah Kota Dumai harus membuat peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas kewenangan antara Dinas PUPR dan Dinas Perkim agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, S. J. W., & Andriyani, N. K. (2019). Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (Ipa) di Kota Surabaya. *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 9(2), 46-53.
- [2] Admosudirjo, Pramudi. 2011. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta:PT. Gable Indonesia
- [3] Edy Sutrisno, 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta. Kencana Prenadamedia group
- [4] Oos. M. Anwar. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung. Alfabet

-
- [5] Simanjutak, Timbul Hamanongan dan Imam Muklis.2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses
- [6] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administratif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Sugiono. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R & D*. Jakarta, Penerbit. CV. Alfabeta
- [8] Sumaryadi dalam Houdson (2015) *Planning in the Public Domain*, Princeton. University Press.
- [9] Tjokroadmidjoyo, Bintoro. 2014. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES
- [10] Diana, R. Badaruddin. (2020) . *Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan The Effectiveness of the Application of E-Planning Systems in Development Planning in the Tapanuli Selatan District*. Program Magister Studi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
- [11] Liatrisna . (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang Di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
- [12] Syahrirsyah. E-Jurnal. *Analisis Penerapan Sistem Informasi E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Polopo*. Universitas Cokroaminoto Polopo Sulawesi Selatan volume 4 nomor 4 Tahun 2015
- [13] Zainudin & Sutjiatmi. (2018). *Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah : Yogyakarta .